

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaludin, L., Huda, U. N., & Fauzia, I. (2020). Pelaksanaan Penyelesaian Hak Atas *Tanah Ex Eigendom Verponding* 2044 Di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *VARIA HUKUM*, 2(1), 88-108.
- H. Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 24
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13
- Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta : kencana prenada media group, hlm 10

JURNAL

- Rachman, Noer Fauzi. 2012. Land Reform Dari Masa Ke Masa. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Liadi, William Seven. 2019. Kedudukan Eigendom Verponding dalam Hukum Pertanahan di Indonesia. *Panorama Hukum*, Vol.4 No.1.
- Abdat, A. A., & Winanti, A. (2020, November). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Eigendom Verponding Yang dikuasai Pihak Lain (Settlement Of Land Disputes Against Eigendom Verponding Controlled By Another Party). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 496-508).
- Syahrul Sitorus, "Upaya hukum dalam perkara perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)" *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1 (Januari- juni 2018), hlm. 63.

Jhuan sabiq, Tamaulina Br. Sembiring “Upaya hukumm acara perdata di indonesia”, *journal ilmiah kajian multidispliner Vol. 8 No. 6*, (Juni 2024), hlm. 479.

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati Dan Ni Made Puspasutari Ujianti “ Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) 2020 ”, Jurnal Konstruksi Hukum Issn :XXXX Volume 1,Nomor 2 , Hal 307

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pokok-Pokok Kebijakanaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Nomor 32 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979.

PUTUSAN

1. Nomor Putusan 683/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.
2. Nomor Putusan 686/PDT/2017/PT.DKI
3. Nomor Putusan 39 K/Pdt/2019